

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Atas berkat Rahmat-Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026, serta dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan dinamika yang ada.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 terdiri atas 4 bab yaitu Pendahuluan; Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan I Tahun Berkenaan; Rencana Kerja dan Pendanaan PD; dan Penutup. Dokumen ini telah memuat evaluasi dan analisa kinerja pelayanan PD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, penjabaran kebijakan pendanaan serta rencana kerja pada sisa waktu tahun berkenaan, guna mendukung visi misi kepala daerah serta memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun, semoga dapat bermanfaat secara internal maupun semua pihak yang berkepentingan *(stakeholders)* dalam rangka Penguatan SDM Unggul dan Ekosisitem Ekonomi Lokal untuk Kemandirian Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Blitar, 11 Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat (2) bahwa berdasarkan Perubahan RKPD, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Tahun 2025 dan SK Bupati Nomor B/180.05/212/409.1.2/KPTS/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025, maka selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyusun Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja) Tahun 2025. Beberapa kondisi yang melatarbelakangi perlunya perubahan dalam RKPD Tahun 2025 mencakup perubahan pada struktur keuangan daerah, khususnya terkait fluktuasi pendapatan asli daerah. Di samping itu, kemampuan anggaran juga menjadi faktor penting yang memengaruhi perubahan tersebut. Selain aspek

keuangan, hasil evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan I turut menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian terhadap rencana program dan kegiatan ke depan. Perubahan ini menjadi bagian integral dalam penyusunan ulang arah pembangunan daerah agar tetap relevan, adaptif, dan akuntabel yang mencakup: a) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah b) Penyesuaian program dan kegiatan perangkat daerah; c) Keuangan daerah dan kerangka pendanaan; d) Target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; e) Prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021- 2026 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju;
2. Berpedoman pada hasil evaluasi Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan I tahun 2025 yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
3. Memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi baik untuk sisa tahun berjalan 2025;
4. Penyusunan Perubahan Renja PD 2025 bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD-P 2025, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD-P 2025.

1.1.1 Keterkaitan antara P-Renja PD dengan P-RKPD

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang–undangan, penyusunan Perubahan Renja salah satunya berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya

antara P-Renja dan P-RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan P-Renja berpedoman pada P-RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 berpedoman kepada Perubahan RKPD Kabupaten Blitar tahun 2025.

1.1.2 Keterkaitan antara P-Renja PD dengan Renstra Perangkat Daerah

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah, berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun, yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri Nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi perangkat daerah. Sehingga harus ada kesesuaian antara dokumen Renstra dengan dokumen Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 juga harus senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

1.1.3 Keterkaitan antara P-Renja PD dengan P-Renja Kementerian / Lembaga dan P-Renja Provinsi

Perubahan Renja Kementerian/lembaga (Renja Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia) dan Perubahan Renja Provinsi (Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur) tidak terkait secara langsung dalam proses penyusunan Perubahan Renja PD, seperti halnya Renstra maupun RKPD. Namun Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur perlu ditelaah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana program pemerintah provinsi dan pusat yang dapat berpengaruh langsung terhadap

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2025.

1.1.4 P-Renja dan Tindak Lanjutnya dalam APBD

Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (P-RKA) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025. Sedangkan P-RKA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen P-APBD Kabupaten Blitar. Oleh karena itu P-Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam P-APBD Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru,

serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan;
15. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2008 Nomor 10/E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
26. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
27. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor 52/D);
28. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2025 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2025 Nomor 63/E).
29. Surat Keputusan Bupati Nomor B/180.05/212/409.1.2/KPTS/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah untuk menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah pada sisa waktu tahun berjalan 2025, yang menjadi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

serta disusun mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Merupakan pedoman pelaksanaaan pelayanan Perangkat Daerah pada sisa waktu tahun berjalan;
b. Sebagai penjabaran Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2025;
c. Sebagai pedoman penyusunan KUPA/PPAS Tahun 2025;
d. Sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025;
e. Sebagai pedoman perangkat daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-RAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB. II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN LALU

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
2.3 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I

BAB. III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian penjabaran dari Tabel Perubahan Rencana Pendanaan dan Rencana Kerja dari lampiran Renja.

BAB. V. PENUTUP

Berisi uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan;
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAAN

2.1 Analisa Kinerja Pelayanan PD

Dalam implementasi kinerja pelayanan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memberikan kontribusi bagi pencapaian misi Bupati ketiga yaitu *"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas"* serta misi keempat yaitu *"Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan"* dengan sasaran strategis 1) meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah; 2) meningkatnya kinerja perdagangan; dan 3) meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan. Pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang dimaksud berdasarkan indikator yang telah ditentukan dalam NSPK dan IKK pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang diampu.

Pencapaian sasaran-sasaran tersebut ditunjukkan oleh capaian rata-rata Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang relatif menggembirakan ditengah berbagai tantangan recovery pasca Pandemic Covid-19, sehingga mampu mendorong pencapaian *outcome* pembangunan daerah yang diharapkan, khususnya pada urusan perdagangan dan urusan perindustrian sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Perdagangan										
1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	20	30	30	30	179,62	-36,05	9,87	0,6	
2	Tertib Usaha	Rekomendasi	2	4	4	5	10	9	4	n/a	
3	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	%	50	60	75	75	95,88	96,33	95,88	n/a	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	87	88	89	89	95,88	96,33	95,88	96,33	
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	%	50	65	75	75	66,67	75	82,35	n/a	
6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	50	65	75	75	66,67	66,67	83	12,05	
	Urusan Perindustrian										
1	Persentase Pertumbuhan PDB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	2	2	2	2	5,35	6,62	5,45	5,40-5,65	
2	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	%	15	16	17	18	14,91	15,46	14,91	15,17-16,07	
3	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta Rupiah	3.960	4.750	6.175	8.000	23.162	24.811	26.022	14.974	
4	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	49.000	49.980	51.940	54.900	54.109	57.838	58.142	62.793	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Juta Rupiah	113.571	115.843	118.160	120.523	137.915	188.961	192.246	193.401	

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.2.1 Tantangan dan Peluang

Permasalahan dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di bidang Perindustrian dan Perdagangan diantaranya adalah:

a. Lemahnya peta industri potensial, masih rendahnya akurasi database sektoral perindustrian dan perdagangan;
b. Belum tercukupinya kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran yang berfungsi baik;
c. Kurangnya tenaga teknis di bidang perindustrian dan perdagangan yang berkompeten;
d. Belum terbangunnya sistem informasi perindustrian dan perdagangan;
e. Belum optimalnya pelaksanaan SOP;
f. Kurangnya sarana dan prasarana (pasar, metrologi, display IKM)

Adapun **tantangan** yang ditemui hingga saat ini adalah:

a. Tingginya jumlah IKM yang masih berproduksi secara konvensional yang mempengaruhi kualitas produk;
b. Rendahnya kualitas manajerial IKM;
c. Masih banyak IKM yang belum bersertifikat / terstandardisasi (Merek, Halal, ISO, SNI, UN);
d. Kemajuan teknologi;
e. Luasnya wilayah pembinaan dan perbedaan kondisi geografis; serta
f. Lesunya ekonomi global;
g. Belum terbentuknya sentra industri sebagai wadah dari pengembangan produktifitas industri sektor unggulan.

Beberapa **peluang** yang dapat diambil adalah:

a. Telah ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Blitar (RPIK) menjadi salah satu pedoman dalam menuju Blitar Agroindustri;
b. Pemberian fasilitasi oleh pemerintah dan *stakeholders* dalam mensupport peningkatan kualitas dan kuantitas produk industri pengolahan berupa pelatihan-pelatihan secara online serta fasilitasi sertifikasi HAKI sehingga meningkatkan daya saing;

c. Semakin mendominasinya pemanfaatan teknologi industri 4.0 dan jaringan pemasaran digital bagi produk unggulan daerah;
d. Bertumbuhnya industri-industri dan pemasaran yang lebih kreatif untuk merebut pangsa pasar.

2.2.2 Isu – Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang turut melatarbelakangi penyusunan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Perlunya *peningkatan kuantitas dan* kapasitas SDM perindustrian dan perdagangan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas ekonomi lokal;
b. Pengembangan industri berbasis potensi lokal

   Perencanaan Pembangunan dan pengembangan industri dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) serta aturan pelaksanaannya perlu disosialisasikan secara massif, serta pengembangan sentra -sentra industri berbasis potensi lokal dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian daerah, baik kontribusi pada PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan *branding* daerah.
c. Revitalisasi pasar rakyat

   Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dikembangkan untuk pengembangan pasar produk unggulan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat serta peningkatan kontribusi pada PDRB dan PAD. Tahun ini Revitalisasi Pasar bertema Pasar Pariwisata.
d. Optimalisasi perlindungan konsumen melalui penguatan manajemen distribusi barang, Uji UTTP, pengawasan standardisasi produk, edukasi, dan pengendalian harga bahan pokok dan barang penting lainnya;
e. Perlunya kerja sama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta untuk perluasan pasar produk unggulan daerah serta diintegrasikan dengan *e-commerce;*
f. Perlunya *updating* data industri dan perdagangan yang diintegrasikan dengan system informasi industri dan perdagangan.

2.3 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD sampai dengan Triwulan I

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dilakukan terhadap capaian kinerja program kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Program Kegiatan

Sesuai evaluasi capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan triwulan I tahun 2025, diketahui bahwa 6 kegiatan dapat memenuhi target kinerja yang direncanakan, 2 kegiatan melampaui target dan 10 kegiatan yang lain tidak memenuhi target. Rata-rata capaian kinerja kegiatan adalah 44,5%.

a. Kegiatan yang Tidak Mencapai Target

Kegiatan yang tidak mencapai target adalah:

- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
- Administrasi Umum PD
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
- Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (terkendala dalam pemenuhan berkas persyaratan)
- Penerbitan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (-)
- Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

b. Kegiatan yang Telah Memenuhi Target

Kegiatan yang dapat mencapai target sebanyak 6 kegiatan yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian PD
- Pemeliharaan BMD (telah sesuai kebutuhan)
- Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya (B2), Pengawasan Distribusi Pengemasan dan Pelabelan B2 di Tingkat Kabupaten;
- Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

c. Kegiatan yang Melampaui Target

Kegiatan yang melampaui target sebanyak 2 kegiatan yaitu:

- Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (102,36%)

  Faktor yang pendorong sehingga capaian kinerja kegiatan ini dapat melampaui target yang ditetapkan adalah karena target awal sebanyak 85 orang merupakan target Renstra, adapun kondisi eksisting pada akhir 2023 adalah 89 orang dan di awal tahun pension sebanyak 2 orang jadi pengelola pasar sebanyak 87 orang.
- Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota (106,75%). Hal ini didorong adanya penambahan industri di awal tahun 2024 yang diduga sebagai imbas pelaksanaan hajat politik nasional (Pemilihan Presiden dan Anggota Legislatif).

d. Faktor-Faktor Penyebab Tercapai/Tidak Tercapai/Melebihi Target Kinerja Program Kegiatan

Sebagian besar kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar belum mencapai target karena memang direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan II dan IV, kecuali pada kegiatan yang memang diharapkan dilaksanakan secara periodik pencapaian

kinerjanya. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran yang tersedia pada tahun ini apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan efisiensi anggaran telah mempengaruhi perubahan dalam pemcapaian target dari beberapa kegiatan yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia diutamakan untuk memenuhi gaji dan tunjangan ASN serta pembayaran jasa tenaga teknis pendukung kegiatan, sedangkan pelaksanaan kegiatan teknis urusan perindustrian dan urusan perdagangan menyesuaikan dengan alokasi anggaran kas yang tersedia dengan tetap memperhatikan target yang akan dicapai tahun 2025 ini.

e. Implikasi Terhadap Target Capaian Program Renstra PD

Berbagai faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja program kegiatan berimplikasi pada pencapaian target renja yang akhirnya juga berdampak pada pencapaian target Renstra PD yang ditetapkan pada tahun berjalan. Namun secara umum bahwa target Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan tidak mengalami perubahan yang signifikan karena masih termasuk dalam sasaran prioritas yang harus terdanai dan dilaksanakan.

f. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang diambil untuk Mengatasi Faktor Penyebab Tersebut

Beberapa capaian kinerja program kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan Triwulan II tahun 2024 telah melampaui target Renstra pada tahun berjalan, sehingga perlu dilakukan penyepakatan untuk mereviu target kinerja pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.

Secara terperinci Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I disajikan pada Tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Nama SKPD: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah																										
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	- Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah	100	%	49,575,938,233	99.71	%	15,937,740,658	100	%	8.534.744.927	27,68	% 2.036.716.628							27,68	2.036.716.628	27,68	25.275.414.585	27,68	58	25.275.414.585
			- Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan	6	%		-3	%		10	%		5,30	%								5,3		5,3		5,3		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*	*100*	*%*	*345.000.000*	*100*	*%*	*78.591.100*	*100*	*%*	*23.078.800*	*50*	*%*	*1.515.000*							50	1.515.000	50	89.686.900	50	26	89.686.900
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36	Dokumen	235.000.000	23	Dokumen	71.221.600	7	Dokumen	14,569,400	3	Dokumen	1.515.000							3	1.515.000	26	80.572.000	72,22	34,29	80.572.000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16	Laporan	110.000.000	11	Laporan	7.369.500	7	Laporan	8.509.400	4	Laporan	-							4	-	22	9.114.900	137,5	8,29	9.114.900

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*	*100*	*%*	*32.274.365.876*	*100*	*%*	*9.280.419.187*	*100*	*%*	*4.530.939.104*	*13,79*	*%*	*1.143.376.390*									13,79	1.143.376.390	13,79	14.706.166.279	13,79	45,57	14.706.166.279
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66	Orang/ bulan	31.512.125.876	42	Orang/ bulan	9.146.093.187	70	Orang/ bulan	4.484.903.104	36	Orang/ bulan	1.134.926.390.00									36	1.134.926.390	36	14.518.104.279	54,55	46,07	14.518.104.279
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	60	Dokumen	630.240.000	108	Dokumen	102.665.000	360	Dokumen	38.220.000	49	Dokumen	8.450.000.00									49	8.450.000	356	149.335.000	98,89	23,69	149.335.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	86	Dokumen	32.000.000	35	Dokumen	31.661.000	17	Dokumen	7.816.000	3	Dokumen	-									3	-	55	38.727.000	63,95	29,34	38.727.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*100*	*%*	*500.000.000*	*100*	*%*	*33.304.796*	*100*	*%*	*37.000.000*	*0*	*%* -								0	-	0	43.611.296	0	8,72	43.611.296
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	54	Orang	500.000.000	12	Orang	33.304.796	15	Orang	37.000.000	0	Orang -								0	-	17	43.611.296	31,48	8,72	43.611.296
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*	*100*	*%*	*1.872.681.100*	*100*	*%*	*935.261.327*	*100*	*%*	*809.869.913*	*5,38*	*%* *5.800.450*								5,38	5.800.450	5,38	1.188.960.345	5,38	60,73	1.188.960.345
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25	Paket	27.468.800	10	Paket	9.192.100	6	Paket	2.204.460	0	Paket -								0	-	11	11.396.560	44	41,49	11.396.560

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7																	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17	Paket	347.710.000	14	Paket	209.863.750	4	Paket	24.417.447	2	Paket 4.320.450							2	4.320.450	17	238.569.943	100	68,61	238.569.943
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	Paket	39.553.000	9	Paket	12.319.000	6	Paket	2.205.792	0	Paket -							0	-	10	14.524.792	40	36,72	14.524.792
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	Paket	28.500.000	20	Paket	5.331.000	12	Paket	2.031.300	0	Paket -							0	-	21	7.321.674	48,84	25,69	7.321.674
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	29	Paket	248.168.750	15	Paket	110.559.600	5	Paket	416.804.290	0	Paket -							0	-	17	126.939.600	58,62	51,15	126.939.600

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan							Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348	Laporan	1.181.280.550	189	Laporan	587.995.877	60	Laporan	281.756.624	3 Laporan	1.480.000							3	1.480.000	319	790.207.776	91,67	66,89	790.207.776
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*	*100*	*%*	613.590.407	*100*	*%*	-	*100*	*%*	-	*0 %*	-							*0*	-	*0*	-	*0*	*0*	-
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40	Unit	613.590.407	0	Unit	-	5	Unit	22.429.177	0 Unit	-							0	-	0	-	0	0	-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase JasaPenunjang UrusanPemerintahan Daerahyang disediakan tepatwaktu*	*100*	*%*	*12.151.376.257*	*100*	*%*	*4.962.317.722*	*100*	*%*	*2.941.072.491*	*25 %*	*708.814.788*							25	708.814.788	25	8.505.148.816	25	69,99	8.505.148.816

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7																	
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	977.500.000	24	Laporan	352.119.367	12	Laporan	280.508.691	3	Laporan 59.415.558							3	59.415.558	39	652.598.259	36,11	66,76	652.598.259
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	11.173.876.257	24	Laporan	4.610.198.355	12	Laporan	2.660.563.800	3	Laporan 649.399.230							3	649.399.230	39	7.852.550.557	65	70,28	7.852.550.557
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*	*100*	*%*	*2.432.515.000*	*98*	*%*	*332.437.831*	*97*	*%*	*192.784.619*	*99,62*	*% 177.210.000*							99,62	177.210.000	99,62	741.840.949	99,62	30,5	741.840.949

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I		II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8		9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	250.485.000	1	Unit	28.375.440	1	Unit	43.500.000	1 Unit	177.210.000							1	177.210.000	1	268.704.490	100	107,27	268.704.490
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35	Unit	455.700.000	33	Unit	59.897.300	35	Unit	82.329.100	0 Unit	-							0	-	17,5	188.564.985	50	41,38	188.564.985
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60	Unit	129.330.000	37	Unit	47.681.188	35	Unit	16.146.788	0 Unit	-							0	-	89	63.600.688	278,13	49,18	63.600.688

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	Unit	1.597.000.000	1	Unit	196.483.903	1	Unit	50.808.731	0	Unit	-							0	-	0,5	220.970.786	50	13,84	220.970.786
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan																											
		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100	%	245.709.896	100	%	37.791.000	100	%	7.200.000	100	%	-							100	-	100	45.791.000	100	100	45.791.000
		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan*	*45*	*Rekomendasi*	*145.709.896*	*39*	*Rekomendasi*	*17.621.000*	*3*	*Rekomendasi*	*4.000.000*	*3*	*Rekomendasi*	-							3	-	3	21.621.000	6,67	14,84	21.621.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
			yang dikeluarkan																									
		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	16	Dokumen	145.709.896	10	Dokumen	17.621.000	3	Dokumen	4.000.000	3	Dokumen	-								3	-	24	21.621.000	150	14,84	21.621.000
		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasa	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan*	*75*	*%*	*100.000.000*	*50*	*%*	*20.170.000*	*75*	*%*	*3.200.000*	*0*	*%*	-							0	-	0	24.170.000	0	24,17	24.170.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV							
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		n Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota*																								
		Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	20	Laporan	100.000.000	6	Laporan	20.170.000	4	Laporan	3.200.000	0	Laporan	-							0	-	10	24.170.000	0	24,17	24.170.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan																											
		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	100	%	9.748.501.021	167	%	6.024.909.699	92	%	8.575.000.000	92	%	173.234.725							92	173.234.725	92	8.075.565.758	92	92	8.075.565.758
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*	*10*	*Unit*	*9.137.624.473*	*13*	*Unit*	*5.973.694.699*	*13*	*Unit*	*8.512.550.000*	*13*	*Unit*	*172.109.725*							13	172.109.725	13	8.000.160.758	100	87,55	8.000.160.758
		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	12	Unit	8.832.369.473	16	Unit	5.728.273.199	13	Unit	8.412.550.000	13	Unit	172.109.725							13	172.109.725	13	7.432.577.408	108,33	84,15	7.432.577.408

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
-	-	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13	Unit	305.255.000	13	Unit	245.421.500	13	Unit	100.000.000	13	Unit	-							13	-	13	567.583.350	100	185,94	567.583.350
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*	*87*	*Orang*	*610.876.548*	*89*	*Orang*	*51.215.000*	*85*	*Orang*	*62.450.000*	*85*	*Orang*	*1.125.000*							85	1.125.000	85	75.405.000	102,41	12,34	75.405.000
		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2	Dokumen	610.876.548	4	Dokumen	51.215.000	2	Dokumen	62.450.000	1	Dokumen	1.125.000							1	1.125.000	8	75.405.000	80	12,34	75.405.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													8			9		10		11								
													I			II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7												12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	75	%	1.300.759.214	67	%	420.155.606	83	%	66.960.000	67	%	37.300.000								67	8.700.000	67	506.565.606	89,33	89,33	506.565.606
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*	*6*	*Unit*	*1.125.759.214*	*6*	*Unit*	*381.128.606*	*6*	*Unit*	*49.660.000*	*6*	*Unit*	*28.600.000*								6	-	6	443.163.606	100	39,37	443.163.606
		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	6	Laporan	213.000.000	6	Laporan	40.484.500	6	Laporan	21.060.000	6	Laporan	-								6	-	6	67.459.500	20	31,67	67.459.500

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		Ki	Kr	Rp
		Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																								
		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6	Laporan	912.759.214	39	Laporan	340.644.106	5	Laporan	28.600.000	5	Laporan	28.600.000							5	-	44	375.704.106	146,67	41,16	375.704.106
		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*	*20*	*Kali*	*175.000.000*	*8*	*Kali*	*39.027.000*	*4*	*Kali*	*17.300.000*	*2*	*Kali*	*8.700.000*							*2*	*8.700.000*	*14*	*63.402.000*	*70*	*36,23*	*63.402.000*

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan									Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV									
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp		Ki	Kr	Rp
		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	20	Laporan	175.000.000	6	Laporan	39.027.000	4	Laporan	17.300.000	2	Laporan	8.700.000							2	8.700.000	14	63.402.000	70	36,23	63.402.000
		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	30	%	3.247.125.982	187.2	%	1.091.619.019	9,87	%	195.515.000	0	%	-							0	-	-	1.374.753.892	0	0	1.374.753.892
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*	*25*	*%*	*3,247,125,982*	*38.46*	*%*	*1,091,619,019*	*30*	*%*	*195,515,000*	*0*	*%*	-							0	-	-	1.374.753.892	0	0	1.374.753.892

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota																									
		Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	105	Pelaku Usaha	1.937.891.926	82	Pelaku Usaha	819.072.030	20	Pelaku Usaha	54.377.900	0	Pelaku Usaha	-							0	-	117	911.050.280	111,43	47,01	911.050.280
		Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	145	Pelaku Usaha	750.844.125	91	Pelaku Usaha	107.095.000	30	Pelaku Usaha	53.940.000	208	Pelaku Usaha	-							208	-	588	180.427.400	405,52	24,03	180.427.400
		Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	88	Pelaku Usaha	558.389.931	40	Pelaku Usaha	165.451.989	10	Pelaku Usaha	37.574.100	0	Pelaku Usaha	-							0	-	64	208.266.026	72,73	37,30	208.266.026

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	-	Produk	-	-	Produk	-	25	Produk	49.623.000	0	Produk	-							0	-	22	75.010.186			75.010.186
	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	75	%	814.577.641	629,75	%	179.523.976	6,25	%	186.000.000	2.99%	%	39.675.000							-2,99	39.675.000	-2,99	669.100.651	-3,99	-3,99	669.100.651
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase UTTP yang sesuai standar*	*92*	%	*814.577.641*	*126*	%	*179.523.976*	*92*	%	*186.000.000*	*6.12%*	%	*39.675.000*							6,12	39.675.000	6,12	669.100.651	6,65	82,14	669.100.651
		Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera/Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapa	63214	Unit	533.838.105	13328	Unit	109.173.976	8500	Unit	127.945.788	520	Unit	24.615.000							520	24.615.000	20715	346.220.651	32,77	64,85	346.220.651

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
			n Ditera Ulang																									
		Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3117	Orang	280.739.536	1394	Orang	70.350.000	550	Orang	58.054.212	147	Orang	15.060.000							147	15.060.000	2117	322.880.000	67,92	115,01	322.880.000
		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	75	%	3.000.174.678	86,88	%	81.671.000	88	%	30.325.000	0	Persen	-							0	-	0	148.756.000	0	0	148.756.000
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*	*140*	*Orang*	*3.000.174.678*	*100*	*Orang*	*81.671.000*	*30*	*Orang*	*30.325.000*	*0*	*Orang*	-							0	-	0	148.756.000	0	0	148.756.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pemenuhan Capaian Perencanaan dan Pembangunan Industri	100	%	1.120.000.000	90	%	1.536.981.553	100	%	1.214.529.600	33,33	%	206.415.356							33,33	206.415.356	33,33	3.152.504.732	33,3	33,3	3.152.504.732
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*	*41*	*Fasilitasi*	*1.120.000.000*	*19*	*Fasilitasi*	*1.536.981.553*	*10*	*Fasilitasi*	*1.214.529.600*	*2*	*Fasilitasi*	*206.415.356*							2	206.415.356	29	3.152.504.732	70.73	206,05	3.152.504.732
		Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		Dokumen			Dokumen	-	1	Dokumen	12.500.000	0	Dokumen	-							0	-	1	205.413.700	16,67	50,10	205.413.700
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber	10	Dokumen	580.000.000	4	Dokumen	300.845.985	2	Dokumen	200.000.000	1	Dokumen	187.515.356							1	187.515.356	7	755.319.411	70	130,23	755.319.411

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
			Daya Industri																										
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	10	Dokumen	540.000.000	9	Dokumen	1.236.135.568	3	Dokumen	1.014.529.600	1	Dokumen	18.900.000							1	18.900.000	15	2.191.771.621	150	405,88	2.191.771.621
		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Rekomendasi Teknis Perizinan Industri yang Diterbitkan Terhadap Jumlah Permohonan yang Masuk	100	%	291.905.000	100	%	19.625.626	100	%	22.500.000	100	%	740.000							25	740.000	25	31.213.742	25	25	31.213.742

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
													I			II		III		IV								
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	*Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan*	*36*	*Rekomendasi*	*291.905.000*	*6*	*Rekomendasi*	*19.625.626*	*7*	*Rekomendasi*	*22.500.000*	*1*	*Rekomendasi*	*740.000*							1	740.000	28	31.213.742	77,78	10,69	31.213.742
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup	4	Dokumen	291,905,000	3	Dokumen	19.625.626	4	Dokumen	7.500.000	0	Dokumen	-							0	-	4	22.825.742	25	7,82	22.825.742

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		n Kabupaten/ Kota	Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri,Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota																									
		Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan /standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha	0	Dokumen	-	0	Dokumen	-	4	Dokumen	15.000.000	1	Dokumen	740.000							1	740.000	22	8.388.000			8.388.000

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi																								

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
			kewenangan pemerintah pusat																								
		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0.41	%	1.104.383.676	65	%	172.585.200	2,69	%	40.000.000	100	%	25.133.508							25	25.133.508	38,24	211.813.798	9326,83	9326,83	211.813.798
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/	*Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri*	*3317*	*Fasilitasi*	*1.104.383.676*	*2537*	*Fasilitasi*	*172.585.200*	*713*	*Fasilitasi*	*40.000.000*	*19*	*Fasilitasi*	*25.133.508*							18	25.133.508	3549	211.813.798	51,43	19,18	211.813.798

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024			Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian dan Kinerja Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (%)		
1	2	3	4	5			6			7			8			9		10		11		12=8+9+10+11		13=6+12		14= 13/5 *100 (Ki & Kr) Rp= 14		
													I			II		III		IV								
				K		Rp	K		Rp	K		Rp	K		Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		Rp	K	Rp	Ki	Kr	Rp
		Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	9	Dokumen	1.104.383.676	2	Dokumen	172,585,200	1	Dokumen	40.000.000	1	Dokumen	25.133.508							1	25.133.508	4	211.813.798	44,44	19,18	211.813.798

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026, tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah "*Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah"* dengan tiga sasaran strategis yang dijabarkan dalam 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas. Pada tahun 2025, target IKU Perubahan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Pencapaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025

No.	Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Kinerja P-Renja	Pagu Indikatif P-Renja (Rp.)
	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Peradagangan sektor Unggulan Daerah	*a. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*	*5,6%*	*11.329.071.688*
		b. Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	*5,25% - 5,50%*	*1.731.140.283*
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	73,4 / BB	9.307.332.094
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	6.018,91 Milyar Rupiah	2.021.739.594
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri	2,69%	1.731.140.283
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	18,92%	

Dalam mencapai kinerja tersebut, dengan adanya keterbatasan SDM, anggaran dan sarana prasarana yang tersedia, maka ditetapkanlah serangkaian program dan kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan pada sisa waktu anggaran berjalan tahun 2025 yang terdiri atas dua urusan yaitu urusan perdagangan (termasuk didalamnya Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah) dan urusan Perindustrian. Secara keseluruhan perencanaan tersebut terdiri dari 10 program, 19 kegiatan dan 41 sub kegiatan yang secara terperinci disajikan pada Tabel Rumusan

Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Program Kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2025 sebagaimana terlampir. Tabel dimaksud dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dijabarkan dalam 7 kegiatan :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :
      a.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 11.850.000,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; 7 dokumen
      - Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
      - Manfaat (*Benefit*) : Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
        Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

      a.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 4.912.978,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; 7 laporan
      - Hasil (*Outcomes*) : Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan; 100 Persen
      - Manfaat (*Benefit*) :
        - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
        - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :
      b.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 6.000.430.494,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN; 87 Orang/Bulan
      - Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100%

- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp. 38.220.000,-

b.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD; 250 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

b.3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.377.700,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD; 17 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

c.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 5.225.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ; 2 Orang
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ; 100 %
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja :

d.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.164.800,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 37.220.500,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan; 4 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.201.850,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.024.550,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan ; 1 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d.5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 212.168.850 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan ; 4 Paket
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 114.105.500,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD; 35 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

d.7 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 0,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD; 0 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

e.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 109.723.700,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan; 13 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :

f.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 296.224.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100%

f.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 2.151.122.772,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan; 12 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu ; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

g.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 206.059.400 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya; 1 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

g.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 67.290.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya; 35 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

g.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 15.510.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara; 35 unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

g.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 25.500.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi; 1 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : - Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan; 20,39%
  - Rata – rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah; 100 %

c. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, dijabarkan dalam 2 kegiatan berikut :

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, dengan indikator kinerja :

a.1 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 1.920.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 30 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan; 30 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

b.1 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelebelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 1.600.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2); 4 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota; 75%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk; 100%

d. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dijabarkan dalam 2 kegiatan :
   a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan indikator kinerja :
      a.1 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 950.514.000,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
      - Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 13 unit
      - Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

      a.2 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 25.421.000 ,-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; 13 Unit
      - Hasil (*Outcomes*) : Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik; 13 unit
      - Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan indikator kinerja :
      b.1 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 23.102.500.-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan; 2 Dokumen
      - Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina; 93 Orang
      - Manfaat (*Benefit*) : Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; 92%

e. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, dijabarkan dalam 3 kegiatan :
   a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :
      b.1 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
      - Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 23.102.500.-
      - Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan; 6 Laporan
      - Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
      - Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 66,67%

b.2 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 22.163.600 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota; 5 Laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar; 6 Kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 66,67%

b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

c.1 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 11.980.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% ; 4 laporan
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan; 4 kali
- Manfaat (*Benefit*) : Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting; 66,67%

f. Program Pengembangan Ekspor, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Pameran Dagang Nasional

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 567.437.500 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang; 45 Pelaku Usaha
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,5%

a.2 Pameran Dagang Lokal

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 51.380.000 ,-
- Keluaran (Output) : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal; 210 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0.5%

a.3 Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 16.056.750,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan; 10 Pelaku Usaha
- Hasil (Outcomes) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,5%.

a.4 Peningkatan Citra Produk Ekspor

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 32.515.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi; 25 Produk
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang; 29,41%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan; 0,5%

g. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, dengan indikator kinerja :

a.1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 70.545.424,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang; 3.000 Unit
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -56,31%

a.2 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 218.753.820 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina; 350 Orang
- Hasil (*Outcomes*) : Persentase UTTP yang sesuai standar; 100%
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -56,31%

h. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan indikator kinerja :

a.1 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 17.800.000 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi; 20 UMKM
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri; 30 Orang
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten; 88,15%

i. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, dijabarkan dalam 1 kegiatan :

a. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 9.355.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri; 1 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 11 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

a.2 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 654.716.258,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri; 4 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 11 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

a.3 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU, DBHCHT); Rp 1.025.501.025 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi. Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat; 6 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri; 11 fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri; 100%

j. Program Pengendalian Izin Usaha Industri, terdiri atas 2 kegiatan:

a. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota. dengan indikator kinerja:

a.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

- Masukan (Input) : Tersedianya dana (DAU); Rp 3.750.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 4 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 8 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan; 100%

a.2 Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 7.500.000,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat; 4 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan; 8 Rekomendasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan; 100%

k. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, terdiri atas 1 kegiatan:

a. Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja :

a.1 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Masukan *(Input)* : Tersedianya dana (DAU); Rp 30.318.000 ,-
- Keluaran *(Output)* : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas); 2 Dokumen
- Hasil (*Outcomes*) : Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri; 713 Fasilitasi
- Manfaat (*Benefit*) : Persentase peningkatan penyediaan informasi industri; 100%

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam proses penyusunan Perubahan Rencana Kinerja (P-Renja) Tahun Anggaran 2025, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada kerangka acuan yang dirumuskan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2025 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026.

Selain target Indikator Kinerja Pemerintah Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar juga bertanggung jawab dalam pencapaian Indikator Kiner ja Kunci (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan kinerja tersebut diperlukan dukungan berupa ketersediaan anggaran kegiatan sebagaimana masukan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas untuk dibiayai dari Perubahan APBD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada sisa tahun berjalan 2025.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat direalisasikan oleh seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Blitar, 11 Juli 2025

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

LAMPIRAN
RENJA-P 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BLITAR
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							**18.907.703.704,00**	**14.406.137.378,00**	**13.060.211.971,00**	**-5.847.491.733,00**							**16.051.701.571,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**18.907.703.704,00**	**14.406.137.378,00**	**13.060.211.971,00**	**-5.847.491.733,00**							**16.051.701.571,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**17.618.174.104,00**	**12.616.607.778,00**	**11.329.071.688,00**	**-6.289.102.416,00**							**15.379.236.915,00**	
1.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**				**1,2 100 Persen Persen**	**20,39 100 Persen Persen**	**8.557.174.104,00**	**7.830.607.778,00**	**9.307.332.094,00**	**2.455.196.988,00**							**11.012.371.092,00**	
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan*				100 Persen	100 Persen	23.078.800,00	20.340.978,00	16.762.978,00	-6.315.822,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-			90.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	14.569.400,00	13.231.500,00	11.850.000,00	-2.719.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang				65.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	7 Laporan	8.509.400,00	7.109.478,00	4.912.978,00	-3.596.422,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang				25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel*				100 Persen	100 Persen	4.530.939.104,00	4.441.026.978,00	6.044.028.194,00	1.513.089.090,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-			7.091.911.346,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	87 Orang/bulan	4.484.903.104,00	4.394.990.978,00	6.000.430.494,00	1.515.527.390,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang				6.931.911.346,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				360 Dokumen	250 Dokumen	38.220.000,00	38.220.000,00	38.220.000,00	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang				130.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				17 Dokumen	17 Dokumen	7.816.000,00	7.816.000,00	5.377.700,00	-2.438.300,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang				30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*				100 Persen	100 Persen	37.000.000,00	13.450.000,00	5.225.000,00	-31.775.000,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				15 Orang	2 Orang	37.000.000,00	13.450.000,00	5.225.000,00	-31.775.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel*				100 Persen	100 Persen	809.869.913,00	428.178.550,00	369.886.050,00	-439.983.863,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		402.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	2.204.460,00	2.164.800,00	2.164.800,00	-39.660,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			6.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	4 Paket	24.417.447,00	37.220.500,00	37.220.500,00	12.803.053,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			72.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																		
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				6 Paket	1 Paket	2.205.792,00	2.201.850,00	2.201.850,00	-3.942,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			8.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	1 Paket	2.031.300,00	2.024.550,00	2.024.550,00	-6.750,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	4 Paket	416.804.290,00	212.168.850,00	212.168.850,00	-204.635.440,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	35 Laporan	281.756.624,00	172.398.000,00	114.105.500,00	-167.651.124,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				400 Dokumen	0 Dokumen	80.450.000,00	0,00	0,00	-80.450.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			10.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran*				100 Persen	100 Persen	22.429.177,00	27.851.400,00	109.723.700,00	87.294.523,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		159.975.162,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel																		
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			25.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	13 Unit	22.429.177,00	27.851.400,00	109.723.700,00	87.294.523,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			134.975.162,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu*				100 Persen	100 Persen	2.941.072.491,00	2.579.820.472,00	2.447.346.772,00	-493.725.719,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		2.657.984.584,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	280.508.691,00	233.896.000,00	296.224.000,00	15.715.309,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	2.660.563.800,00	2.345.924.472,00	2.151.122.772,00	-509.441.028,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			2.457.984.584,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik*				100 Persen	100 Persen	192.784.619,00	319.939.400,00	314.359.400,00	121.574.781,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		510.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	1 Unit	43.500.000,00	206.059.400,00	206.059.400,00	162.559.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				35 Unit	35 Unit	82.329.100,00	72.260.000,00	67.290.000,00	-15.039.100,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			95.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	35 Unit	16.146.788,00	16.120.000,00	15.510.000,00	-636.788,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	50.808.731,00	25.500.000,00	25.500.000,00	-25.308.731,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**				**100 %**	**100 %**	**7.200.000,00**	**7.200.000,00**	**3.520.000,00**	**45.814.835,00**							**53.014.835,00**	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*				3 Rekomendasi	30 Rekomendasi	4.000.000,00	4.000.000,00	1.920.000,00	-2.080.000,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		23.014.835,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik																		
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				3 Dokumen	30 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	1.920.000,00	-2.080.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			23.014.835,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota*				75 Persen	75 Persen	3.200.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)																		
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				4 Laporan	4 Laporan	3.200.000,00	3.200.000,00	1.600.000,00	-1.600.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan**				**92 Persen**	**92 Persen**	**8.575.000.000,00**	**3.750.000.000,00**	**999.037.500,00**	**-6.188.406.416,00**							**2.386.593.584,00**	
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik*				11 Unit	13 Unit	8.512.550.000,00	3.718.785.000,00	975.935.000,00	-7.536.615.000,00			-	PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup	-		2.239.817.036,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	13 Unit	8.412.550.000,00	3.680.214.000,00	950.514.000,00	-7.462.036.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup			2.166.612.036,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				13 Unit	13 Unit	100.000.000,00	38.571.000,00	25.421.000,00	-74.579.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			73.205.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina*				85 Orang	93 Orang	62.450.000,00	31.215.000,00	23.102.500,00	-39.347.500,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		146.776.548,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				2 Dokumen	2 Dokumen	62.450.000,00	31.215.000,00	23.102.500,00	-39.347.500,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			146.776.548,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting**				**83 Persen**	**66,67 Persen**	**66.960.000,00**	**75.100.000,00**	**44.693.600,00**	**224.040.000,00**							**291.000.000,00**	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar*				6 Kali	6 Kali	49.660.000,00	57.800.000,00	32.713.600,00	-16.946.400,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		251.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan																		
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				6 Laporan	6 Laporan	21.060.000,00	21.100.000,00	10.550.000,00	-10.510.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			51.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				5 Laporan	5 Laporan	28.600.000,00	36.700.000,00	22.163.600,00	-6.436.400,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan*				4 Kali	4 Kali	17.300.000,00	17.300.000,00	11.980.000,00	-5.320.000,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.04.2.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																		
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				4 Laporan	4 Laporan	17.300.000,00	17.300.000,00	11.980.000,00	-5.320.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			40.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
5.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan**				**9,87 Persen**	**0,5 Persen**	**195.515.000,00**	**537.150.700,00**	**667.389.250,00**	**510.424.431,00**							**705.939.431,00**	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang*				30 Persen	29,41 Persen	195.515.000,00	537.150.700,00	667.389.250,00	471.874.250,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		705.939.431,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				20 Pelaku Usaha	45 Pelaku Usaha	54.377.900,00	404.377.900,00	567.437.500,00	513.059.600,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			232.937.875,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				30 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	53.940.000,00	53.940.000,00	51.380.000,00	-2.560.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			204.261.625,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan																		
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	37.574.100,00	32.113.500,00	16.056.750,00	-21.517.350,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			122.329.931,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.05.2.01.0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor																		
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				25 Produk	25 Produk	49.623.000,00	46.719.300,00	32.515.000,00	-17.108.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-2 Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat PP-2 Meningkatkan Kapasitas SDM Pelaku Ekonomi dan Penguatan Pemberdayaan Masyarakat			146.410.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
6.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan**				**6,25 Persen**	**-56,31 Persen**	**186.000.000,00**	**386.000.000,00**	**289.299.244,00**	**-908.551,00**							**185.091.449,00**	
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Persentase UTTP yang sesuai standar*				92 Persen	100 Persen	186.000.000,00	386.000.000,00	289.299.244,00	103.299.244,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		185.091.449,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang																		
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				8500 Unit	3000 Unit	127.945.788,00	127.945.788,00	70.545.424,00	-57.400.364,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			123.134.526,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal																		
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				550 Orang	350 Orang	58.054.212,00	258.054.212,00	218.753.820,00	160.699.608,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			61.956.923,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
7.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten**				**88 Persen**	**88.15 Persen**	**30.325.000,00**	**30.549.300,00**	**17.800.000,00**	**714.901.524,00**							**745.226.524,00**	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri*				30 Orang	30 Orang	30.325.000,00	30.549.300,00	17.800.000,00	-12.525.000,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		745.226.524,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																		
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				20 UMKM	20 UMKM	30.325.000,00	30.549.300,00	17.800.000,00	-12.525.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			745.226.524,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**1.289.529.600,00**	**1.789.529.600,00**	**1.731.140.283,00**	**441.610.683,00**							**672.464.656,00**	
1.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri**				**100 Persen**	**100 Persen**	**1.227.029.600,00**	**1.727.029.600,00**	**1.689.572.283,00**	**-944.529.600,00**							**282.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri*				10 Fasilitasi	11 Fasilitasi	1.227.029.600,00	1.727.029.600,00	1.689.572.283,00	462.542.683,00			Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		282.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	1 Dokumen	12.500.000,00	12.500.000,00	9.355.000,00	-3.145.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			45.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				2 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	700.000.000,00	654.716.258,00	454.716.258,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			122.500.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				3 Dokumen	6 Dokumen	1.014.529.600,00	1.014.529.600,00	1.025.501.025,00	10.971.425,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU) DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			115.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	**Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan terhadap jumlah permohonan yang masuk**				**100 Persen**	**100 Persen**	**22.500.000,00**	**22.500.000,00**	**11.250.000,00**	**150.705.000,00**							**173.205.000,00**	
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan*				7 Rekomendasi	8 Rekomendasi	22.500.000,00	22.500.000,00	11.250.000,00	-11.250.000,00			-	PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup	-		173.205.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota																		
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	3.750.000,00	-3.750.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup			80.955.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)																		
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				4 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	7.500.000,00	-7.500.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup PP-5 Pemantapan Infrastruktur Ekonomi serta Daya Dukung Lingkungan Hidup			92.250.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase peningkatan penyediaan informasi industri**				**2,69 Persen**	**100 Persen**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**30.318.000,00**	**176.759.656,00**							**216.759.656,00**	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri*				713 Fasilitasi	713 Fasilitasi	40.000.000,00	40.000.000,00	30.318.000,00	-9.682.000,00			-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang	-		216.759.656,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	30.318.000,00	-9.682.000,00	Kab. Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang PP-3 Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Lokal dan Penguatan Manajemen Distribusi Barang			216.759.656,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	J U M L A H								**18.907.703.704,00**	**14.406.137.378,00**	**13.060.211.971,00**	**-5.847.491.733,00**							**16.051.701.571,00**	